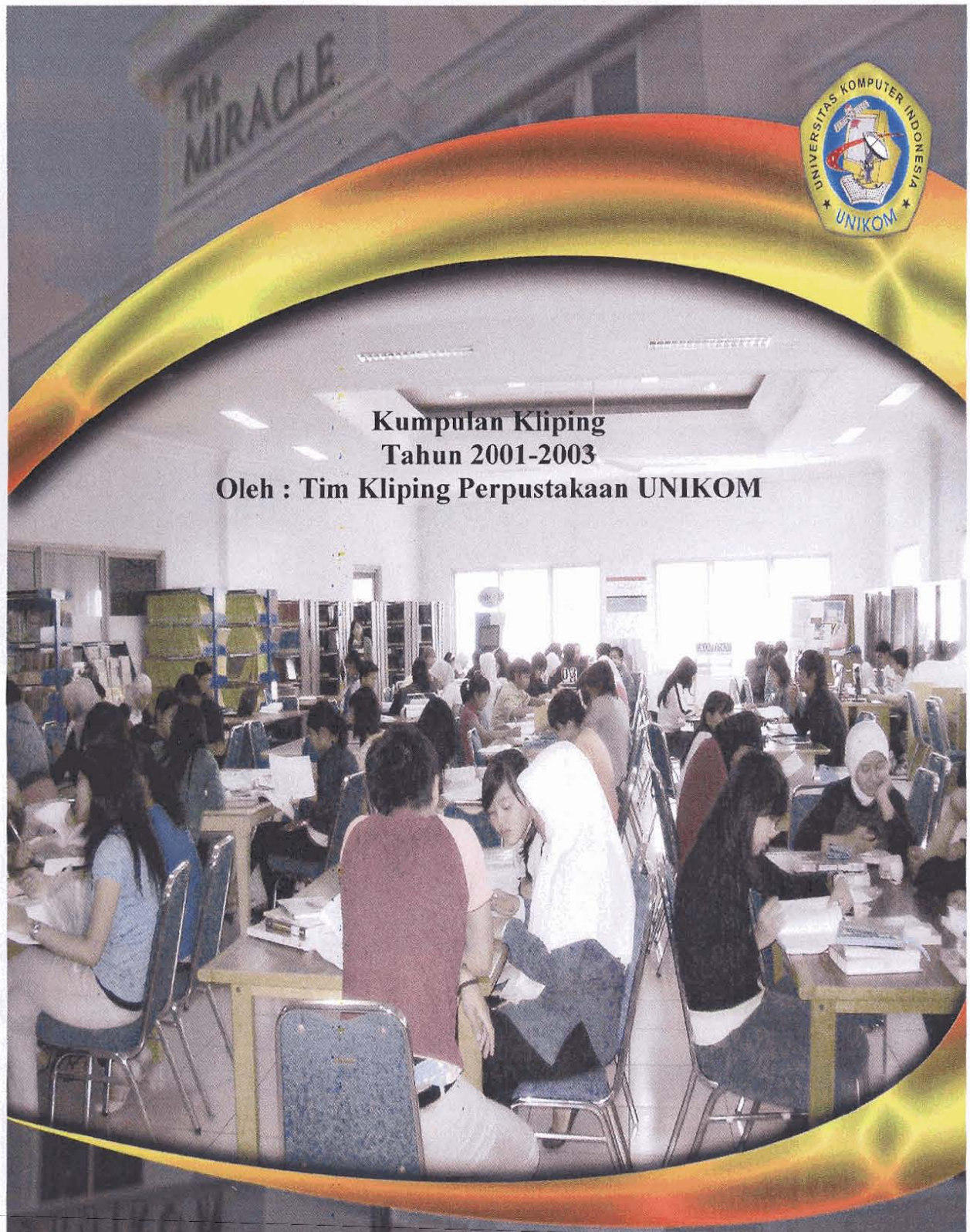


Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM

perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 16 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 29 / 1 - 8
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : CHANG, WILLIAM
Subjek / NO. CLASS : SUMBER DAYA MANUSIA/ KOLONIALISME / 325.3

"Quo Vadis" Indonesia?

◆ Bahaya Neokolonialisme

William Chang

SEORANG teman asal Eropa Barat berseloroh, "Bagaimanakah kalau penduduk negaraku dipindahkan ke Pulau Kalimantan (bagian Indonesia) dan seluruh penduduk Kalimantan ke negara kami? Kita lihat perkembangan Kalimantan setelah seperempat abad kemudian! Kalimantan takkan kalah dari Eropa Barat." Saya tak serius menanggapi pernyataan itu, meski hati kecil tertawa sedih. Kebenaran seloroh teman itu masih harus dibuktikan. Ini tidak seluruhnya mustahil, sebab wajah Hongkong berubah setelah dikelola Inggris selama satu abad. Mungkinkah sebuah kontrak sosial baru bisa dilaksanakan? Pro dan kontra akan muncul menanggapi hal ini.

SEBAGIAN negara kita memang tak terurus. Banyak daerah di Republik yang telah merdeka 57 tahun ini seakan menjadi daerah tak bertuan. Banyak sungai berantakan, jalan raya hancur ditelan ombak laut, kekayaan alam digarap sesuka hati, penyelundupan kekayaan hutan ke negara lain, distribusi solar kembang kempis, dan jumlah pengemis usia anak-anak hingga kakek-nenek terus bertambah. Pembangunan liar tumbuh subur (vila-vila mewah di kawasan Puncak). Izin mendirikan bangunan (IMB) hanya berlaku untuk mereka dan bangunan tertentu. Pemerintah akan mengincar bangunan mahal yang akan mempertebal kocek mereka.

Pembangunan fisik yang selama ini dibanggakan "penguasa" ("pengusaha") Republik ini ternyata belum menganut prinsip keadilan. Konon, sejumlah "jenderal" pernah berubah menjadi "konglomerat" dan pemilik kawasan hutan. Perbedaan kondisi hidup antara kota dan desa amat mencolok. Apa pun yang diperlukan, umumnya dapat ditemukan di kota, sementara itu orang-orang dari desa harus ke kota. Akibatnya, arus urbanisasi kian meningkat. Keadaan ini berbeda dari banyak daerah maju di dunia, seperti kawasan Eropa Barat. Orang desa tidak perlu/harus pindah ke kota, sebab di desa dapat terpenuhi segala kebutuhan dan tersedia lapangan kerja bagi masyarakat desa.

Terbengkalainya pembangunan dalam negara ini terbentur pada sejumlah alasan klasik seperti sumber daya manusia yang belum memadai (padahal banyak orang mampu tidak diberi peran semestinya karena birokrasi korup warisan rezim Orde Baru-Orba), sumber dana masih kurang (padahal korupsi kian merajalela), negara terlampau luas (padahal otonomi daerah yang diterapkan tidak dipantau serius), peran aktif rakyat dianggap kurang (padahal mereka menjadi korban pembangunan fisik yang superfisial). Kalau begitu, sebenarnya di mana letak terbengkalainya negara kita? Pertama-tama pada pemerintah, birokrasi, dan sistem kontrol yang memang lemah. Hukum tidak ditegakkan seadil-adilnya. Aparat pemerintah sebagian sudah waktunya dipensiunkan dan diganti generasi lain yang belum terpolusi.

◆◆◆

LALU, Indonesia *quo vadis*? Pertanyaan ini muncul sebagai tanggapan atas seruan Ketua MPR Amien Rais dalam Muktamar XII Pemuda Muhammadiyah, 7 Juli 2002 di Surabaya (*Kompas*, 8/7/2002). Kapan akan teratasi rentetan krisis multidimensi kita, seperti ketidakpuasan sejumlah daerah yang terarah pada disintegrasi nasional (Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam), konflik-konflik yang bertopeng etnis, agama, dan ras serta citra buruk dalam bidang korupsi di mata dunia?

Jawaban atas pertanyaan itu terkait motivasi dasar perjuangan para "arsitek" Republik ini. Cita-cita dasar apakah yang tersembunyi di balik perjuangan untuk meraih kemerdekaan? Perjuangan kemerdekaan pada hakikatnya ingin meniadakan segala bentuk penjajahan (diskriminasi) yang menginjak dan mengisap kemanusiaan. Hidup dalam kemerdekaan termasuk unsur konstitutif manusia, meski makna kemerdekaan sering diselewengkan dan disalahgunakan. Bahwa para perancang Republik ini ingin meniadakan benih penjajahan adalah motivasi awal dan dasar seluruh perjuangan bangsa.

Cita-cita dasar itu tidak cukup hanya diingat, dibicarakan, dan diperdengarkan, tetapi perlu diwujudnyatakan, sebab cita-cita ini merupakan tolok ukur untuk memantau keadaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. Sejak pertengahan rezim Orde Baru hingga kini, barometer kehidupan bangsa kita yang tersembunyi ini dilupakan oleh penguasa yang berubah status menjadi "pengusaha" yang terjun dalam dunia permainan kuasa. Akibatnya telah dan akan terasa kini dan di masa depan. Nilai dasar kemanusiaan diabaikan, bahkan luput dari perhatian. Yang dipentingkan beberapa mantan penguasa Republik ini adalah perpanjangan kuasa dan penumpukan harta kekayaan. Ketidakadilan sosial merajalela. Yang kaya menjadi lebih kaya, yang miskin akan mengalami kemiskinan hingga beberapa keturunan.

Masa depan negara bangsa kita terkait keadaan kemarin dan hari ini. Keterpurukan bangsa dalam pelbagai dimensi hidup memang memprihatinkan. SDM masih lemah. Belum semua pihak mengecap

Perpustakaan Unikom

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

pendidikan formal. Keadaan pendidikan masih memprihatinkan. Pentingnya mutu pendidikan jarang diagendakan. Unsur ideologi penguasa masuk ke dunia pendidikan formal, tanpa menyadari proses pembohongan generasi muda yang lahir sejak dan setelah Orba.

Arah bangsa perlu bertitik tolak dari realitas sosial. Dan, bangsa kita tidak perlu terlampau banyak bercita-cita atau berkeinginan tinggi, sebab realitas sosial yang pahit dan sakit belum sungguh dihadapi dan diselesaikan. Mencita-citakan sesuatu yang indah dan tinggi akan membuat generasi sekarang melupakan tugas utama penguasa sekarang, seperti pemberantasan korupsi, penegakan hukum positif secara adil, mewujudkan kesejahteraan bangsa dari Istana Presiden hingga daerah pedalaman di luar ibu kota Jakarta.

◆◆◆

YANG paling membahayakan negara dan bangsa kita adalah kebangkitan neokolonialisme. Pembersihan dunia hukum yang bersifat diskriminatif belum sungguh-sungguh dilaksanakan. Orang-orang tertentu (kadang dengan rasionalisasi artifisial) dianggap "kebal hukum", sementara itu si pencuri ayam dan sandal harus meringkuk beberapa bulan di penjara. Pemegang duit sanggup mempengaruhi pemegang hukum untuk mengubah pasal-pasal dalam KUHP. Dunia hukum menyakitkan dan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan.

Politik adu domba (*divide et impera*) masih diterapkan di beberapa kawasan di Republik ini. Memang, tidak sedikit warga kita mudah dihasut atau diadu domba. Masyarakat sederhana dan kecil tampaknya agak mudah "dibeli" oleh mereka yang berkepentingan, yang berkuasa dan berduit. Banyak orang kecil dan sederhana bertindak di luar kesadaran. Mereka hanya ikut-ikutan. Akibatnya, menyedihkan! Mereka yang akan menanggung ekor perbuatannya, sedangkan yang "menggunakan" mereka dapat cuci tangan, bahkan luput dari tuduhan apa pun. Kerja sama dalam bentuk pinjam uang luar negeri (seperti IMF, World Bank) bukankah termasuk bagian "neokolonialisme" yang tampaknya hanya sanggup mengenyangkan sejumlah orang dalam negeri ini? Utang membengkak, rakyat kecil tetap miskin!

Beberapa langkah bisa ditempuh menghadapi gejala neokolonialisme yang masih hidup dan berkembang di negara kita.

Pertama, penguasa, pejabat, pegawai negara yang masih bermental "kontra-reformasi" perlu segera dilengserkan dari kursinya, diganti mereka yang dianggap bersih, berdedikasi, berjiwa reformatif, dan rela berkorban demi perbaikan keadaan negara. Lembaga yudikatif perlu bekerja ekstrakeras dalam penanganan kasus-kasus yang dihadapi oleh mereka yang sedang dalam tampuk kekuasaan. Tanpa kerja keras dan keinginan untuk menegakkan keadilan (diimbangi dengan penghargaan yang layak), mustahil kasus-kasus pelanggaran hukum di negara dapat diselesaikan tanpa bertele-tele. Segala bentuk kepentingan politis disingkirkan dari arena peradilan. Sejak reformasi hingga kini, sudah berapa kasus besar di Republik ini sungguh dituntaskan? Kurang tenaga ahli?

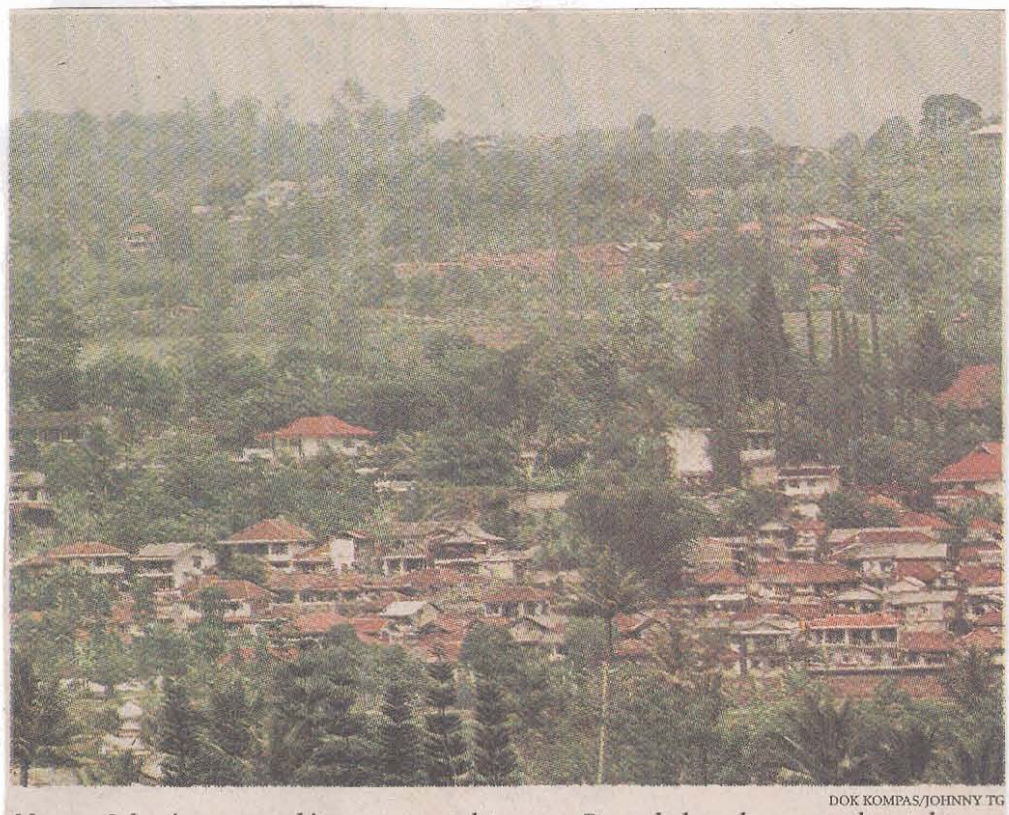
Kedua, diperlukan pejabat bersih (malu dan merasa bersalah jika berkorupsi!) dan berwibawa, sebab banyak pegawai dan aparat pemerintah kini "salah tingkah" dan "hilang wibawa". Anggota Polantas, misalnya, hanya duduk dan berteduh di bawah pondok yang didirikan di persimpangan jalan. Mereka omong-omong, baca koran, dan membiarkan pengendara melanggar peraturan lalu lintas. Polisi hutan membiarkan penduduk membakar gambut di musim kemarau hingga menimbulkan polusi yang mendatangkan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Pemda kewalahan dan tak berwibawa menangani kasus-kasus yang sebenarnya merugikan masyarakat banyak. Penanganan sampah masih menjadi sebuah *national issue*. Ke manakah dana retribusi sampah dan mekanisme kerja apa yang dianut selama ini? Badan-badan usaha milik negara seperti PLN dan PAM jarang yang tidak rugi. Para pejabat masih bisa mempertahankan kursi, meski laporan pertanggungjawabannya ditolak. Aneh bin ajaib, tetapi nyata!

Ketiga, perbaikan keadaan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan bangsa takkan terwujud dalam satu tahun atau satu generasi, tetapi membutuhkan waktu dan tenaga tidak sedikit. Ini harus dimulai dari pihak pemerintah dan penguasa di Republik ini, sebab mereka menerima tanggung jawab utama dan pertama untuk mengurus negara ini. Tiap bulan mereka menerima pembayaran dari kas negara dan rakyat. Rakyat umumnya akan berpartisipasi bila melihat pemerintah sungguh-sungguh ingin memperbaiki bangsa dan negara. Yang menyedihkan, justru sejumlah aparat pemerintah mulai memelopori pelanggaran aturan permainan. Dengan berpakaian dinas, misalnya, aparat pemerintah mendidik rakyat melanggar aturan lalu lintas.

Terlepas dari aneka bentuk "keberhasilan" yang seharusnya dicapai selama masa kemerdekaan, generasi sekarang masih perlu menyadari bahaya laten neokolonialisme yang tetap akan mencekam hidup dan perkembangan bangsa kita. Memasuki HUT ke-57 RI, kita perlu memiliki mentalitas dan sikap yang sungguh reformatif, antikolonial, antikorupsi, dan antidiskriminasi!

WILLIAM CHANG
Pengamat sosial, tinggal di Pontianak

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....



DOK KOMPAS/JOHNNY TG

Liar — *Sebagian negara kita memang tak terurus. Banyak daerah yang seakan tak bertuan. Banyak sungai berantakan, jalan raya hancur, pembangunan liar tumbuh subur di mana-mana terutama vila-vila mewah seperti di kawasan Puncak, Jawa Barat. Izin mendirikan bangunan (IMB) pun hanya berlaku untuk bangunan tertentu saja.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 16 / Agustus / 2003
Hlm/Kolom : 4 / 4-6
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : SUTANTO, Limas
Subjek /NO. CLASS : KEMERDEKAAN / 320.9

Merdeka?

KEMERDEKAAN bukanlah barang yang "jadi begitu saja". Ia senantiasa merupakan proses, perjuangan, tumbuh-kembang, dan pemekaran. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 pun tidak menjamin kemunculan kemerdekaan sebagai sebuah barang jadi yang bisa segera dinikmati bangsa Indonesia. Justru proses tersulit yang niscaya dialami, dititi, dan diperjuangkan manusia atau bangsa dalam perekahan, tumbuh-kembang, dan pemekaran kemerdekaan, adalah dialektika internal dalam jiwa si manusia sendiri, serta dialektika eksternal antara si manusia dan masyarakat atau bangsanya.

Dialektika internal dalam jiwa manusia warga negara terjadi dalam rangkuman interaksi tak kunjung henti antara rasio sadar, afeksi bawah sadar, dan rahmat Tuhan. Dialektika pemerdekaan akan menuju kondisi insani yang ditandai peraihan kembali kemampuan untuk menyadari kebenaran atau realitas, dan kemampuan membuat serta mengejawantahkan pilihan-pilihan secara rasional sadar.

Dialektika pemerdekaan pada perspektif pergulatan internal jiwani individu memungkinkan kian luas dan makin dalamnya peran rasio sadar dalam mentransendensi desakan-desakan afeksi bawah sadar. Dialektika pemerdekaan itu memungkinkan rasio sadar makin intim menimba inspirasi, hikmah, dan berkat dari rahmat Tuhan. Maka kemudian boleh terlihat proses pemerdekaan individu secara gradual memunculkan warga yang rasional sadar dalam berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku.

Lihatlah kini nasib individu warga Indonesia yang dikatakan "telah merdeka 57 tahun". Secara kognitif mereka semua bisa mengetahui betapa mereka tidak boleh melakukan korupsi dan tidak boleh melakukan tindak kekerasan. Namun, apa yang mereka ketahui itu tidak secara signifikan mereka ejawantahkan dalam tindakan dan perilaku yang konsonan (sejalan). Justru yang mereka ejawantahkan adalah tindakan dan perilaku yang disonan (bertentangan) dengan khazanah kognisi mereka sendiri. Pada titik ini boleh disadari, betapa peran rasio sadar sedemikian minimal, sebegitu lemah, dan miskin. Hamparan individu warga Indonesia yang dikatakan "telah merdeka 57 tahun", lebih banyak dikuasai desakan-desakan afeksi-bawah sadar yang irasional, impulsif, kompulsif, otomatis, dan habitual, dalam rangkuman dua tema besar kekacauan jiwa warga Indonesia paling mengerikan: korupsi dan tindak kekerasan. Sungguhkah hamparan individu warga Indonesia telah merdeka?

◆◆◆

DIALEKTIKA eksternal antara manusia dan masyarakat atau bangsanya pada perspektif perekahan, tumbuh-kembang, dan pemekaran kemerdekaan terjadi dalam rangkuman proses tak henti-henti pemenangan kesadaran akan kebersamaan nan rasional, melampaui impuls-impuls pengagungan dan pengutamaan diri sendiri, pengagungan dan pengutamaan suku, ras, golongan, keluarga, kelompok, dan identitas keagamaan. Proses tak henti-henti itu menuju pemerkuatan kesadaran akan kebersamaan nan rasional, yang sungguh menandai kekuatan pengejawantahan semangat: "Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing," dan semangat: "Ayolah lakukan yang sungguh terbaik buat kita semua", oleh hamparan mayoritas warga negara Indonesia dalam himpunan kebangsaan Indonesia.

Lihat kini, bagaimana nasib himpunan mayoritas warga negara Indonesia yang dikatakan "sudah merdeka 57 tahun"? Sungguhkah mereka bisa mengejawantahkan transendensi kepentingan bersama nan sejati atas kepentingan diri sendiri? Sungguhkah mereka telah bisa mewujudnyatakan pemenangan kesadaran akan kebersamaan nan rasional, melampaui impuls-impuls irasional nonrealistis habitual kompulsif berbasis kepicikan sentimen suku, ras, kelompok, keluarga, golongan, dan identitas keagamaan?

Sungguhkah warga negara Indonesia mampu menundukkan dirinya sendiri yang haus kekuasaan, dengan berkorban lewat pelepasan kekuasaan dari genggaman tangannya demi kepentingan masyarakat luas yang benar-benar membutuhkan penguasa baru atau pemimpin baru di era Indonesia yang sungguh baru? Sungguhkah para "wakil rakyat" yang duduk mentereng di ruang-ruang sidang gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat mampu men-

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

transendensi impuls-impuls irasional bawah sadar yang mendesak mereka untuk kembali memecah belah Indonesia dengan mendikotomikan "pribumi" lawan "nonpribumi" dalam horizon Indonesia? Deret panjang pertanyaan bisa dibentangkan, oleh siapa pun yang sudi melihat realitas Indonesia kini yang masih miskin kesadaran akan kebersamaan nan rasional.

mau tak mau mencuat kuat dan tebal di tengah deret pertanyaan gugatan atas kemerdekaan Indonesia yang dikatakan "telah diraih sejak 57 tahun lampau". Namun, mestikah warga negara Indonesia dan bangsa Indonesia berkecil hati? Bukankah kemerdekaan tidak pernah tampil sebagai barang jadi yang bisa segera dinikmati? Bukankah pemerdekaan adalah proses gradual tak henti, perjuangan terus-menerus, yang memang selalu memakan waktu sangat panjang?

Maka mau tak mau satu ungkapan kunci niscaya mencuat: "Tabah, sabar, dan terus berjuanglah dalam pemerdekaan nan sejati". Tabahlah rakyat Indonesia. Sabarlah bangsa Indonesia. Terus berjuanglah rakyat dan bangsa Indonesia, dalam alur pemerdekaan nan sejati. Titik awal pemerdekaan sudah dikristalisasikan pada 17 Agustus 1945, lima puluh tujuh tahun silam, namun perjuangan pemerdekaan masih terus berlangsung hingga kini dan masih akan terus merebak nanti. Pemerdekaan sama sekali belum selesai.

Namun, selalu saja ada rasa khawatir bakal munculnya kemalasan, ketakacuhan, dan ketakutan di tengah perjalanan amat panjang yang pasti melelahkan, bahkan mungkin sekali membosankan, memuakkan, dan menjijikkan. Wajar pula bila kini muncul kekhawatiran akan meresapnya kemalasan, ketakacuhan, dan ketakutan di tengah perjalanan pemerdekaan Indonesia yang kian terasa berbatu-batu, berkelok-kelok tajam, naik-turun tak karuan, amat berdebu sampai memburamkan mata yang mau melihat ke depan. Bahkan, perjalanan amat panjang itu mesti melewati jalan-jalan yang penuh perampok dan penjahat. Di tengah kondisi demikian, muncullah kembali pertanyaan dari manusia yang khawatir dan cemas: Sungguhkah perjalanan pemerdekaan itu bisa terus berlangsung?

Jelas sekali, Indonesia butuh pengarah yang jujur, pengarah yang tidak menjadikan jalan-jalan nan sulit itu kian berdebu tebal, pengarah yang justru menjadikan mata bisa melihat jelas ke depan. Jelas sekali, Indonesia butuh penjaga keamanan dan penegak aturan yang jujur, penjaga keamanan dan penegak aturan yang benar-benar mematahkan ulah para perampok dan para penjahat, bukan penjaga keamanan dan penegak aturan pura-pura, yang justru bekerja sama dengan para perampok dan para penjahat, bahkan pula menjadi perampok dan penjahat.

Jelas, Indonesia juga amat membutuhkan media massa penyebar semangat pemerdekaan yang merawat daya juang rakyat dan bangsa, sehingga mereka benar-benar selalu tabah, sabar, dan terus berjuang dalam alur pemerdekaan nan sejati. Hamparan media massa yang bebas itu, sudilah berpihak pada pemerdekaan Indonesia nan sejati, sediakan ruang-ruang kalian untuk pemerdekaan sejati, kendati kalian mesti terus menyambung hidup dengan memanfaatkan pula laba kapitalistis secara wajar.

Tanggal Tujuh Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua, rakyat dan bangsa Indonesia tidak lagi cuma berteriak, "Merdeka!!" Kini mereka juga bertanya, "Merdeka??" Mereka masih mempertanyakan kemerdekaan, karena mereka masih mau meneruskan pemerdekaan.

LIMAS SUTANTO
Psikiater, tinggal di Malang

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 16 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 28 / 1-4
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : PURNOMO PR., ALOYS BUDI
Subjek / KLASS : KEMERDEKAAN (TEORI POLITIK) - 320.01

Bakti bagi "Ibu Pertiwi"

Aloys Budi Purnomo

◆

DALAM perjalanan beberapa waktu yang lalu di Kota Abadi, Roma, Italia, saya sempat beberapa hari istirahat di Wisma Kedutaan RI untuk Vatikan di Via Oceano Atlantico 246, Eur Roma.

SAYA berjumpa dengan Dubes Widodo Soetiyoso. Saya sempat menyaksikan beberapa anak muda warga negara Indonesia sedang latihan upacara bendera di kedutaan, menyongsong tanggal 17 Agustus 2002, hari kemerdekaan. Tumbuhlah rasa nasionalisme! Indonesia Merdeka!!

Bangsa Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-57. Sebagai anak-anak bangsa, baiklah kita bertanya diri, apakah yang sudah kusumbangkan bagi kedamaian negeri ini? Apa baktiku bagi Ibu Pertiwi?

Di usianya yang ke-57, Indonesia menjadi Ibu Pertiwi yang telah kenyang dengan banyak suka-duka. Tetapi juga, barangkali, Ibu Pertiwi telah kehabisan air mata menyaksikan anak-anaknya berada dalam perjuangan untuk menjadi bangsa yang benar-benar merdeka. Merdeka bukan hanya dari belenggu penjajahan bangsa asing, melainkan merdeka dari segala bentuk kekerasan, penipuan, dan omong kosong para pemimpin negeri ini.

◆◆◆

MENYAMBUT HUT kemerdekaan yang ke-57, saya mendapat inspirasi dari sebuah kisah wanita Roma yang sangat mencintai ibunya dan berbakti kepadanya. Orang Roma mengenang kisah ini sebagai *Caritas Romana*, dalam sebuah buku yang ditulis Christine de Pizan (*The Book of the City of Ladies*, New York: Persea Books, 1983).

Kisah ini sangat inspiratif bagi seluruh anak negeri ini dalam menyambut ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan merenungkan bakti apa yang bisa dipersembahkan bagi Ibu Pertiwi dalam usia kemerdekaan yang ke-57.

Kisah itu menceritakan seorang ibu yang sedang menjalani proses hukuman mati. Sebagai narapidana hukuman mati, sang ibu dipenjarakan dan tidak seorang pun diperkenankan memberikan kepadanya makanan maupun minuman. Dengan cara itulah, dia harus menjalani hukuman mati; bukan dengan ditembak, dipenggal kepalanya, atau lainnya. Dia dibiarkan kelaparan dan kehausan dalam sel, sampai mati sendiri.

Atas hukuman tersebut, seorang anak perempuan ibu itu sangat sedih. Terdorong oleh rasa cinta dan baktinya kepada ibunya, sang putri memohon kepada penjaga penjara agar diperkenankan mengunjungi sang ibu. Dia memohon kepada sang petugas agar diperkenankan mengunjungi ibunya setiap hari, selagi sang ibu masih hidup. Dengan demikian, dia dapat menjadi teman dalam penderitaan ibunya sampai ajal menjemputnya.

Wanita itu dengan sangat mendesak dan memohon agar diperkenankan mengunjungi ibunya setiap hari. Sang petugas pun merasa iba dan kasihan melihat wanita itu terus memohon kepadanya. Wanita itu pun diizinkan mengunjungi ibunya setiap hari di penjara, selagi ibunya masih hidup. Syaratnya, dia tidak boleh membawa makanan maupun minuman.

Begitulah, wanita itu setiap hari dapat mengunjungi sang ibu, setelah petugas memeriksa dirinya dan yakin bahwa dia tidak membawa makanan maupun minuman ke dalam penjara.

Anehnya, sudah sekian hari ibu itu di dalam penjara dalam keadaan tidak makan dan minum, namun dia belum juga mati. Hal ini sangat mustahil dan mengherankan bagi para petugas penjara. Bagaimana mungkin ibu itu bisa bertahan hidup begitu lama tanpa makan dan minum? Padahal, selama ini, yang mengunjungi ibu itu hanyalah seorang anak wanitanya. Itu pun setelah dia diperiksa dengan teliti dan cermat bahwa dia sungguh-sungguh tidak membawa makanan secuil pun maupun minuman setetes pun saat mengunjungi ibunya.

Pada suatu saat, para petugas penjara diam-diam menyelidiki apa yang terjadi saat wanita itu bersama ibunya di dalam penjara. Mereka terperanjat melihat kenyataan bahwa anak wanita yang mengunjungi ibunya di dalam penjara itu membiarkan ibunya mengisap air susu dari payudaranya.

Wanita itu ternyata baru saja melahirkan sehingga air susu yang mestinya diberikan untuk bayinya, dia bagikan kepada ibunya yang sedang dipenjarakan dengan hukuman mati tanpa makanan dan minuman. Itulah sebabnya, ibu itu tidak kunjung mati kelaparan ataupun kehausan, karena setiap hari putrinya membiarkan sang ibu menyusu dan untuk mendapatkan gizi dari air susunya. Dan dengan cara itu, sang putri memberikan kehidupan kepada sang ibu di saat jiwanya terancam, sama seperti dia telah menerima kehidupan dari sang ibu di saat dia masih bayi.

Kasih dan pengorbanan sang putri kepada ibunya itu membuat para petugas tahanan merasa sangat terharu dan iba. Dan ketika peristiwa itu dilaporkan kepada para hakim yang telah menjatuhi hukuman mati kepada ibu tadi, hati mereka pun tergerak oleh belas kasihan. Mereka pun dikuasai oleh semangat bela rasa (*human compassion*), dan kemudian membebaskan ibu itu, melepaskannya dari penjara pulang bersama putrinya.

◆◆◆

KISAH ini sangat inspiritatif bagi kita anak-anak negeri ini. Alangkah indahnya rasa kemanusiaan negeri ini kalau setiap anak negeri ini rela memberikan "air susu"-nya demi kehidupan Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi negeri ini rasanya sudah sekian lama dijerat oleh kesedihan, yang juga menjadi kesedihan anak-anak negeri yang masih memiliki bersih hati nurani, jernih budi, dan hening jiwa. Krisis kepemimpinan, krisis kepercayaan, krisis ekonomi bahkan krisis kemanusiaan menjadi akar kesedihan Ibu Pertiwi serasa dia pun dipenjarakan dalam kesunyian.

Makna kisah, terutama dalam perspektif sang putri bukan hanya menampilkan sebuah cinta kasih (*caritas*) seorang anak kepada ibunya melainkan juga memaparkan kebijaksanaan (*pietas*) yang menghargai kehidupan dan kemanusiaan. Meminjam interpretasi Elisha Schulte van Kessel dalam *Image and Blindfold* (dalam Peter van Kessel, *The Power of Imagery, Essays on Rome, Italy & Imagination*, 1992:179), konsep *pietas* mengekspresikan "*a union of family feeling, civic spirit, loyalty to the sovereign power and fear of the God, was an essential value in the late classical, hierarchically structured society.*"

Alangkah indahnya, kalau *pietas* macam itu menjadi roh setiap anak bangsa dalam berbakti kepada Ibu Pertiwi. Persatuan dan kesatuan dijunjung tinggi, kekeluargaan yang sejati (bukan dalam arti korupsi, kolusi, dan nepotisme) dikedepankan. Roh kewarganegaraan sebagai dasar bagi masyarakat sipil ditegakkan. Begitulah masyarakat dibangun dalam kebijaksanaan; dalam *pietas*.

Pietas macam itulah yang kiranya dibutuhkan oleh negeri ini. *Pietas* macam itulah yang dapat kita persembahkan sebagai air susu bagi Ibu Pertiwi sehingga bangsa ini dapat bertahan hidup lebih lama dalam cinta, persatuan, dan rasa kemanusiaan.

Dengan demikian, meminjam ide Thomas Heller CS (dalam *Reconstructing Individualism*, 1986) antara anak-anak negeri dan Ibu Pertiwi dapat menciptakan "*our family and our place for us in society*".

Merdeka!!

ALOYS BUDI PURNOMO PR
Rektor Seminari Tinggi St Petrus Pematang Siantar, Sumatera Utara

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : Minggu / 23 / Juni / 2002
Hlm/Kolom : 3 / 1-9
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : RAHMAH, Mustaha Abd.
Subjek : POLITIK LUAR NEGRI / 327.1

Intifada dan Aksi Bunuh Diri Palestina

PERS Israel menyebut bulan Juni ini sebagai "Bulan Juni Hitam". Betapa tidak, dalam bulan Juni ini saja, Israel kehilangan sekitar 50 warganya dan lebih dari 100 lainnya luka-luka akibat serangkaian aksi bunuh diri Palestina. Pekan lalu, tentu juga sangat layak dijuluki "Pekan Hitam", karena dalam pekan lalu itu saja 31 warga Israel tewas dan hampir 100 lainnya luka-luka akibat serangan bunuh diri Palestina itu.

DENGAN demikian, konflik Israel-Palestina *mencapai titik* kulminasi keradikalan pada pekan lalu sejak meletus Intifada Al Aqsa pada 28 September 2000 atau bahkan dari usia konflik yang telah lebih dari setengah abad ini. Dari semula bentuk perlawanan dengan cara pelemparan batu ke arah pasukan Israel, lalu kontak senjata terbatas antara gerilyawan Palestina dan pasukan Israel, penembakan rudal Palestina yang dikenal dengan rudal "Al Qassam" dari Jalur Gaza, hingga terakhir ini: pola aksi bunuh diri.

Warga Palestina kini seakan berlomba mengorbankan dirinya melakukan aksi bunuh diri atau *kamikaze*. Kaum wanita Palestina pun kini turut tidak ketinggalan mendaftarkan diri untuk melakukan aksi *kamikaze*.

Ingat Ayat Akhras (16 tahun) yang tewas dalam aksi bom bunuh diri pada 29 Maret 2002, dan sebelumnya Idris Wafa (28 tahun), gadis pembawa bom bunuh diri pertama, pada 27 Januari 2002. Kini seakan tidak ada hari, pekan atau bulan tanpa aksi bunuh diri Palestina.

Gelombang pola perlawanan Palestina yang terus mengalami peningkatan secara kualitas tersebut dari waktu ke waktu selama dua tahun terakhir ini, terjadi disebabkan reaksi Israel yang berlebihan dalam upaya meredam aksi Intifada Palestina itu. Reaksi Israel tersebut seperti pemboman dengan pesawat tempur F-16 dan helikopter Apache atas instalasi strategis Palestina serta pembunuhan terhadap para aktivis Palestina.

Menteri Pertahanan Israel Benjamin Ben Eliezer hari Jumat lalu (21/6) mulai mengakui bahwa aksi militer Israel ikut serta bertanggungjawab terjadinya keterputusasaan dan hilangnya harapan serta harga diri rakyat Palestina hingga mereka berlomba melancarkan serangan bunuh diri.

Israel, masyarakat internasional, sejumlah negara Arab dan pimpinan Palestina sendiri, telah kehilangan akal bagaimana cara mencegah aksi-aksi bunuh diri Palestina itu. Aksi balasan militer Israel yang paling dahsyat pun ternyata tidak mampu meredam aksi bunuh diri Palestina.

Lihat, agresi militer Israel besar-besaran ke kota-kota dan desa-desa Palestina di Tepi Barat serta pengepungan markas besar Yasser Arafat di Ramallah yang disebut "Operasi Perisai Dinding" selama bulan April dan Mei lalu, tidak mampu pula menghentikan aksi serangan bunuh diri Palestina. Bahkan sebaliknya, pasca operasi perisai dinding itu, aksi bunuh diri Palestina semakin menunjukkan eskalasi kebrutalannya seperti yang terjadi pekan lalu.

Tulisan ini ingin mencoba mengidentifikasikan apa, siapa, bagaimana dan motivasi melakukan aksi bunuh diri itu serta bentuk reaksi Israel.

Aksi bunuh diri merupakan bentuk tindakan personal, bukan aksi militer. Aksi militer bertujuan menghancurkan musuh semata. Sedang tujuan aksi bunuh diri adalah menghancurkan musuh dan pelakunya sekaligus.

Meski bersifat personal, namun operasi serangan bunuh diri Palestina melibatkan sebuah tim. Selain pelaku serangan bunuh diri itu sendiri, dalam tim tersebut ada yang bertugas merakit serpihan bahan peledak dan paku, sehingga menjadi sebuah bahan peledak. Ada yang bertugas memilih dan menentukan sasaran dan ada juga bertugas menembus jaringan keamanan Israel.

Struktur tim tersebut sangat kecil untuk mencegah terjamah oleh aparat keamanan Israel. Antara pelaku serangan bunuh diri dan ketua tim tersebut, tidak memiliki kontak langsung, namun melalui seorang perantara, sehingga sangat sulit dilacak.

Bagi rakyat Palestina, dikenal ada dua bentuk perlawanan bersenjata terhadap pendudukan Israel. Pertama, aksi serangan bunuh diri yang dilakukan para pemuda dan pemudi dengan meledakkan dirinya melalui bahan peledak atau dinamit di tempat keramaian Israel, seperti terminal bis, di dalam bis penuh penumpang, restoran dan pasar. Kedua, serangan yang dilancarkan terhadap pemukiman Yahudi dan markas-markas militer Israel yang menimbulkan terjadinya baku tembak sengit.

Aksi serangan bunuh diri semula hanya dilancarkan aktivis Hamas dan Jihad Islami, kemudian diikuti pula oleh sayap militer faksi Fatah pimpinan Yasser Arafat, Brigade Al Aqsa, gerakan pemuda Fatah pimpinan Marwan Bargouti, Tanzim, satuan elit pengawal Yasser Arafat Force 17, dan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP). Para pimpinan Hamas menyebut aksi serangan bunuh diri itu sebagai pesawat F-16 Palestina.

Aksi bunuh diri itu sebagian besar dilakukan oleh para pemuda lajang berusia antara 18 tahun hingga 24 tahun, berasal dari keluarga miskin dan sangat fanatik dalam pemahaman agamanya. Bahan peledak

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun :
Hlm/Kolom :
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
Subjek :

yang mereka bawa biasanya seberat 15 kg hingga 20 kg.

Motivasi melakukan aksi bunuh diri itu, antara lain ingin meniru keberhasilan pelaku serangan bunuh diri sebelumnya terhadap sasaran Israel, atau balas dendam atas penghinaan dan pelecehan terhadap dirinya atau keluarganya, atau juga rasa putus asa dalam hidupnya akibat tiadanya kebebasan yang membuat tidak bisa mengenyam pendidikan dan meraih pekerjaan serta terus dibayangi kekejaman pendudukan Israel.

Pelaku serangan bunuh diri Palestina itu, biasanya juga meninggalkan surat wasiat yang berisi motivasi melakukan bunuh diri tersebut.

Jamal Nasser—pelaku serangan bunuh diri yang meledakkan dirinya di dalam bis dekat kota Jenin pada Maret 2001—mengatakan dalam surat wasiatnya, melakukan aksi bunuh diri karena cinta pada Allah SWT, membela Mesjid Al Aqsa dan balas dendam atas tewasnya warga Palestina ditangan Israel.

Pelaku serangan bunuh diri yang gagal, Zaidan Zaidan asal kota Jenin yang kini berbaring di rumah sakit Israel mengungkapkan, terpaksa melakukan serangan bunuh diri karena balas dendam melihat tentara Israel melecehkan kaum wanita Palestina dengan cara menelanjangi di tengah keramaian.

Teknologi bahan peledak yang dirakit untuk dijadikan bom bunuh diri itu juga mengalami kemajuan sangat pesat. Bahan peledak dalam aksi bunuh diri di Haifa pada 10 April 2002 yang menewaskan delapan warga Israel dan melukai 12 lainnya, diketahui terbuat dari bahan peledak tipe C-4 dan RDX yang biasa digunakan militer. Sebelumnya, Palestina menggunakan bom yang terbuat dari bahan peladak tipe TATP yang lebih tradisional dibanding tipe C-4 dan RDX.

Diduga, Palestina berhasil memperoleh bahan peledak tipe C-4 dan RDX itu dari pasar gelap di Israel atau negara-negara Arab lain. Israel biasanya menuduh Iran, Irak dan Suriah mendukung serta menyuplai senjata pada kelompok militan Palestina. Namun dugaan lebih besar, Palestina mendapat bahan peledak tipe C-4 dan RDX tersebut dari pasar gelap Israel sendiri, sebab sangat sulit—untuk tidak mengatakan mustahil—menembus perbatasan Israel untuk menyelundupkan senjata atau bahan peledak.

Masalah legitimasi aksi serangan bunuh diri Palestina itu, masih menjadi pro dan kontra, khususnya setelah agresi Israel ke kota-kota dan desa-desa Palestina di Tepi Barat serta pengepungan markas besar Yasser Arafat di Ramallah.

Sebagian besar intelektual Arab dan Palestina serta bahkan pimpinan Palestina sendiri menentang aksi serangan bunuh diri atas sasaran sipil Israel, dengan dalih lebih merugikan perjuangan Palestina sendiri di tengah ketimpangan perimbangan kekuatan di kancah global maupun Israel-Palestina, terlebih lagi setelah tragedi 11 September 2001 di AS.

Seorang intelektual Mesir, Dr Mustafa Fiki yang kini menjabat ketua komite luar negeri parlemen Mesir, menulis pada harian *Al Ahram* edisi 9 April 2002 dengan judul "Palestina dan Budaya Bunuh diri". Dalam tulisan tersebut, Fiki mengungkapkan, tidak simpatinya terhadap aksi serangan bunuh diri Palestina atas sasaran sipil Israel karena hanya membawa dampak negatif di mata masyarakat internasional.

Meski demikian, Fiki menentang tekanan dan tuduhan Israel serta sejumlah negara Barat bahwa Yasser Arafat tidak berusaha yang cukup menghentikan aksi serangan bunuh diri itu. Menurut Fiki, Arafat tidak memiliki tongkat untuk mampu meredam aksi bunuh diri Palestina, di tengah rakyat Palestina kini mengalami keputusasaan yang luar biasa dan tiadanya harga diri sebagai manusia.

Seorang penasihat Yasser Arafat, Mamdouh Nofel, juga menulis pada harian *Al Hayat* edisi 13 Mei 2002 dengan judul "Serangan bunuh diri terhadap sasaran sipil membawa kerugian besar pada perjuangan Palestina".

Nofel secara khusus mengkritik keras serangan bunuh diri di Rishon Letzion, Tel Aviv pada 7 Mei 2002 yang menewaskan 15 warga Israel dan sebelumnya aksi bunuh diri di Netanya pada 27 Maret 2002 yang menewaskan 29 warga Israel. Serangan bunuh diri Palestina di Netanya itu, menyebabkan Israel melancarkan agresi besar-besaran ke Tepi Barat bulan April dan Mei lalu.

Nofel juga mengecam keras Hamas yang bertanggungjawab atas serangan bunuh diri di Netanya dan Rishon Letzion itu. Menurut Nofel, Hamas telah melanggar kesepakatan nasional Palestina dengan melakukan tindakan yang lebih banyak merugikan kepentingan rakyat Palestina.

Seorang intelektual Mesir, Muhammad Salmawi, menulis pada harian *Al Ahram* edisi 20 Mei 2002 dengan judul "Apakah telah berakhir efektivitas serangan bunuh diri?". Salmawi mengatakan, Israel sangat berhasil membonceng kereta tragedi 11 September 2001 di AS, dengan mengkategorikan serangan bunuh diri Palestina sebagai aksi teroris seperti serangan bunuh diri atas Gedung Pentagon di Washington dan World Trade Center (WTC) di New York pada 11 September 2001.

Keberhasilan Israel itu, kata Salmawi, membuat masyarakat internasional khususnya AS tidak membedakan lagi antara aksi teroris dan perlawanan melawan penjajahan, yang pada gilirannya rasa simpati lebih mengalir pada Israel pasca tragedi 11 September itu.

Akan tetapi para ulama dan negara-negara Arab garis keras tetap mendukung serangan bunuh diri Palestina. Seorang ulama Shiah dari Lebanon, Muhammad Hussein Fadlallah menegaskan, aksi serangan bunuh diri Palestina dibenarkan secara agama, dan terkategori Jihad.

Seorang ulama dari Lebanon, Sheikh Faisal Maulawi juga menyatakan, aksi bunuh diri adalah wajib bagi rakyat Palestina yang mampu. Menurut Maulawi, warga Palestina yang tewas dalam aksi bunuh diri itu adalah mati syahid. Ia lalu menyerukan, para pemuda Palestina melancarkan aksi bunuh diri selama itu dianggap satu-satunya cara dalam melakukan Jihad.

Presiden Irak Saddam Hussein beberapa hari lalu juga memuji serangan bunuh diri Palestina terhadap sasaran Israel.

Reaksi Israel

Dalam menghadapi gelombang serangan bunuh diri Palestina itu, Israel selama ini menerapkan empat pola reaksi, yaitu membangun pagar keamanan antara wilayah Israel dan Tepi barat, membunuh para aktivis Palestina, menyerang dengan cara pukul mundur kota-kota dan desa-desa Palestina, serta menduduki dalam waktu cukup lama kota-kota dan desa-desa Palestina itu.

Seperti diketahui, Israel sejak pekan lalu mulai membangun pagar keamanan yang memakan waktu enam bulan dan rencananya memiliki panjang sekitar 130 km. Israel mengklaim, pagar keamanan itu dimaksudkan untuk mencegah serangan bunuh diri Palestina ke kota-kota Israel. Pagar keamanan itu yang akan dibangun dari desa Salem di Tepi Barat utara hingga Kfar Kassem di Tepi Barat selatan, berupa penggalian jurang-jurang pemisah dan kawat berduri

yang dilengkapi alat diteksi elektronik canggih. Biaya pembangunan pagar keamanan tersebut diperkirakan sekitar 220 juta dollar AS.

Inisiatif pembangunan pagar keamanan itu sebenarnya bukan baru, tetapi sudah timbul sejak masa pemerintah mendiang PM Yitzhak Rabin. Setelah terjadi aksi serangan bunuh diri Palestina di Tel Aviv pada 22 Januari 1995, pemerintah Israel saat itu mulai membahas kemungkinan membangun pagar keamanan itu. Mendiang PM Yitzhak Rabin saat itu mengungkapkan, pagar keamanan akan dibangun dalam beberapa bulan mendatang dan sudah waktunya ada perbatasan yang jelas antara Palestina dan Israel sesuai dengan perbatasan tahun 1967.

Israel juga mengambil reaksi dengan membunuh para aktivis Palestina selama Intifada Al Aqsa ini. Israel pertama membunuh seorang komandan militer faksi Fatah di Tepi Barat, Hussein Abiyat (37) pada 9 November 2000.

Sejak itu, Israel melakukan pembunuhan secara berkesinambungan terhadap para aktivis Palestina yang terus berlangsung hingga saat ini. Para pimpinan teras aktivis Palestina yang tewas di tangan Israel adalah Tsabit Tsabit (pemimpin Fatah di Tul Karm) yang tewas pada 31 Desember 2000, Mas'ud Ayyad (salah seorang komandan Force 17) yang tewas pada 13 Februari 2001, Iyad Hardan (komandan militer Jihad Islami di Tepi Barat) yang tewas pada 5 April 2001, Jamal Mansur dan Salim Mansur (keduanya aktivis Hamas di kota Nablus) yang tewas pada 31 Juli 2001, dan yang menonjol tewasnya Sekjen Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) Abu Ali Mustafa di Ramallah pada Agustus 2001. Sejak meletusnya intifada Al Aqsa hingga saat ini, sedikitnya 400 aktivis teras Palestina dari berbagai faksi politik telah terbunuh.

Sejak akhir 2001 lalu, Israel melakukan pula kebijakan pukul mundur kota-kota dan desa-desa Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang termasuk kategori wilayah A, dimana secara keamanan dan sipil dibawah kontrol penuh Palestina. Puncak dari praktik pukul mundur itu dilakukan pada 29 Maret lalu yang mengepung markas besar Yasser Arafat dan Gereja Al Mahd di Bethlehem yang merupakan tempat kelahiran Yesus Kristus selama hampir dua bulan.

Sejak pekan lalu, Israel mulai menerapkan kebijakan baru yakni menduduki dalam waktu cukup lama kota-kota Palestina di Tepi Barat, dimulai dari kota Jenin dan Kalkiliya hari Selasa lalu, Bethlehem hari Kamis lalu dan Nablus hari Jumat lalu, setelah gelombang aksi serangan bunuh diri Palestina ternyata masih terus berlanjut.

Tampaknya serangan bunuh diri Palestina akan terus berlanjut, selama mereka tidak diberi harapan hak-haknya dapat diraih kembali, yaitu berdirinya negara Palestina dengan ibu kota Jerusalem Timur.

MUSTHAFA ABD RAHMAN
dari Cairo

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 18 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 4-5 / 1-8
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / NO. CLASS : POLITIK / 320.1

Politik Tentara Belum Berakhir

DALAM sebuah tulisannya berjudul *Fundamental Proses Perubahan UUD 1945 (Kompas, 6/8/2002)*, Agus Widjojo, Wakil Ketua MPR yang juga penasihat Fraksi TNI/Polri MPR, antara lain mengemukakan pendapatnya bahwa "akhirnya, perubahan apa pun yang dihasilkan, harus bertujuan memenuhi tolok ukur: (1) mampu mengayomi dan menjawab tuntutan ciri kebhinnekaan bangsa; (2) memberi ketegasan sistem politik bebas dari sifat kerancuan koalisi; (3) mampu membangun pemerintahan yang efektif guna mengendalikan arah pembangunan nasional dan dibangun di atas landasan kesepakatan terhadap kaidah fundamental visi tata penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia masa depan yang demokratis, modern, dan beradab berdasarkan Pancasila".

Boleh dibilang, itulah rumusan sikap konservatif tentara di dalam merespons dan menghadapi perubahan sistem politik nasional. Perubahan memang sulit dielakkan walaupun hasilnya belum dapat dipastikan. Namun, asumsinya adalah perubahan sistem politik nasional, berdasar inisiatif konstruktif dari hasil Perubahan UUD 1945, diharapkan mampu mengarah pada penguatan demokrasi.

Penguatan demokrasi sendiri diharapkan mampu secara signifikan mempengaruhi membaiknya kondisi multikrisis, dan pada akhirnya memperkuat posisi kita sebagai bangsa yang bermartabat, kokoh, dan mandiri.

"Politik TNI adalah politik negara", demikian kalimat yang kerap meluncur dari para petinggi TNI, tatkala ditanya soal politik. TNI tidak mau terjebak pada urusan politik, dan tidak mau pula menjebakkan diri berpolitik. TNI ingin mempertegas profesionalismenya di bidang pertahanan dan keamanan nasional, di bawah paradigma supremasi sipil. Pandangan demikian, belakangan kerap terlontar dari kalangan tentara. Dan, jelas perlu pembuktian.

Tampaknya di Sidang Tahunan (ST) MPR 2002, kalangan TNI/Polri ingin membuktikan bahwa pihaknya tidak alergi perubahan. Dikeluarkannya sikap TNI/Polri tentang Perubahan UUD 1945 dalam ST MPR oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto merupakan gejala menarik dalam dinamika politik militer transisi.

Tentara lewat Panglima mengeluarkan dua pilihan: kembali dulu ke naskah asli UUD 1945 hingga Pemilu 2004; dan alternatif kedua menyepakati seluruh hasil perubahan UUD 1945 sebagai konstitusi transisi, yang kemudian dikaji ulang oleh Komisi Konstitusi. (*Kompas*, 31/7/2002)

Kesannya memang bersayap. Tidak ada satu tafsir yang bisa memastikan pandangan politik TNI/Polri tersebut. Sikap hati-hati dan *wait and see* memang menonjol.

Pantas dicatat, TNI/Polri bukan faktor signifikan penghambat proses Perubahan UUD 1945. Di tubuh internal TNI/Polri, tampak ada dua kecenderungan: (1) yang setuju untuk mempertahankan UUD 1945, katakan kelompok konservatif garis keras; dan (2) yang setuju Perubahan UUD 1945, sebut saja kelompok konservatif lunak.

Tampaknya, eksistensi dan pengaruh kalangan konservatif garis keras, tidak signifikan, sebab yang keras berteriak kebanyakan justru para purnawirawan. Sementara sikap politik TNI/Polri jelas tak mungkin dibikin keras, melainkan harus dikesankan independen dan tidak antiperubahan.

Hanya saja, kini pergesekan pendapat internal TNI/Polri tidak terasa keluar. Tidak seperti fenomena fragmentasi politik militer yang begitu transparan di masa Presiden Abdurrahman Wahid tempo hari. Mungkin ini wujud dari "keberhasilan konsolidasi internal TNI" di bawah komando Panglima TNI Jenderal Endriartono, yang dikenal tegas dalam menerapkan sistem komando. Lantas, dari mana publik bisa merasakan adanya "fragmentasi" di tubuh TNI kini? Antara lain dari pilihan sikap di atas.

◆◆◆

CATATAN yang ditegaskan oleh Agus Widjojo tersebut tergolong bersifat "konservatif lunak". Tapi, namanya juga "kriteria normatif", hal itu tidak menutup kemungkinan memunculkan adanya penafsiran berbeda. Cara pandang kalangan tentara soal poin "mampu mengayomi dan menjawab tuntutan ciri kebhinnekaan bangsa" misalnya, mungkin berbeda dengan pendapat lain dari kalangan nonmiliter.

Apakah hal itu dimaksudkan sebagai cara untuk kembali ke sentralisasi pengendalian kekuasaan? Ataukah, justru mempertegas paradigma desentralisasi, dengan prioritas yang lebih pada ciri kebhinnekaan daerah? Agaknya masih perlu diskusi panjang soal ini. Intinya, kelak, bagaimanapun segala problematika bangsa tak bisa diselesaikan dengan keputusan sepihak dengan mengabaikan proses dialog sipil-militer.

Ditariknya kekuatan politik TNI/Polri dari DPR dan MPR, secara tegas menandakan berakhirnya campur tangan politik formal mereka. Namun, bukan berarti lantas TNI/Polri tidak berpolitik sama sekali—mengingat

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

politik tak sebatas bermakna formal, yakni memiliki wakil di parlemen.

Pandangan TNI maupun Polri soal pelbagai persoalan sosial dan politik nasional adalah bagian dari politik. TNI dan Polri masih memiliki peluang berpolitik secara tidak langsung. Pada intinya politik mereka adalah penerjemahan atas sikap konservatif yang menjadi ciri khasnya, yang tak bisa dihilangkan.

Bagi kalangan tentara, perubahan politik boleh terjadi, tapi prinsip-prinsip dasar yang konservatif, tidak boleh dilanggar. Soal perubahan sistem politik, sistem bikameral akan segera diterapkan, maka dapat dipastikan tak akan ada wakil TNI/Polri lagi di parlemen.

Bolehlah diucapkan selamat tinggal politik TNI/Polri di parlemen. Kini, mereka harus menaati tata main yang muncul atas sistem politik baru, di mana semua wakil rakyat dipilih oleh rakyat, tak ada yang diangkat. Bila hendak berprofesi dikancah politik anggota TNI/Polri harus pensiun dulu, dan bisa berkompetisi dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

TNI/Polri memang tidak perlu berkecil hati bila, lantas, posisinya di DPR dan MPR hilang. Mungkin hal ini harus dibaca sebagai bagian dari sumbangan mereka yang berharga bagi masa depan bangsa dan negara.

◆◆◆

TNI/Polri sebaiknya memilih jalan yang menegaskan bahwa Indonesia akan bisa melewati masa transisi dengan baik, ke arah alam "demokrasi yang sesungguhnya". Sehingga pihaknya bukan menjadi faktor penghambat demokrasi, alias faktor yang mempertegas kehadiran kondisi "transisi permanen", sebuah masa transisi yang tak kunjung usai.

Intervensi politik—baik secara langsung, ataupun tidak, dengan cara kasar ataupun halus—oleh kalangan militer dikhawatirkan hanya akan membawa kondisi politik nasional ke dalam sistem yang semiotoriter. Maka, yang perlu didorongkan ke militer Indonesia adalah, kehendak kuat untuk mengakhiri masa transisi, menuju demokrasi. Artinya ia harus mendorong proses demokratisasi.

Bagi kalangan sipil, "bahaya tentara" hingga kini masih membayang. Tentara masih kerap diartikan sebagai kelompok kepentingan yang memiliki ambisi politik, yang setiap saat bisa menciptakan peluang, dan merebut peluang itu untuk "berkuasa". Mungkin tidak lewat kudeta militer yang amat tidak populer itu. Melainkan dengan cara yang lebih bersifat menciptakan kondisi politik, di mana lantas kalangan politisi sipil tak ada pilihan lain selain memberikan sebagian besar kekuasaan politik pada tentara.

Kini, kalangan konservatif lunak yang dominan menguasai TNI, sehingga tidak alergi terhadap perubahan. Persoalannya, bagaimana bila kelak yang mendominasi tentara adalah kelompok konservatif garis keras?

Di tengah arus deras perubahan, maka bila tentara tidak mau berubah, maka hanya akan membuat kondisinya menjadi fatal. Wawasan politik tentara perlu terus dikembangkan, untuk memahami secara benar dan tepat di mana pihaknya bisa menempatkan diri. Memperluas wawasan politik, terutama bagi kalangan elite tentara, jelas amat diperlukan, supaya tidak berbenturan dengan kehendak politik kalangan sipil. Tetapi lebih dari itu, terutama adalah mereka bisa menghargai demokrasi, dan bukan untuk merebut kekuasaan politik.

◆◆◆

FAKTOR eksternal, juga amat berpengaruh, yakni kondisi kalangan sipil. Memang dualisme sipil-militer menyisakan banyak pertanyaan, dan dalam konteks tertentu kurang relevan dipaksakan.

Akan tetapi, bila yang dimaksud kalangan sipil adalah para pemain politik formal, di mana partai-partai politik dominan, maka dinamika mereka menjadi faktor. Bila dinamika politik sipil goyah, dan cenderung memberi kesimpulan awal atas kondisi "instabilitas politik permanen", maka dalam kondisi seperti itu militer lebih mudah tergoda untuk kembali terjun ke wilayah politik kekuasaan.

Politik TNI/Polri belum berakhir memang; dan mereka suka memilih idiom "politik negara" sebagai hal yang menegaskan bahwa pihaknya udak berpolitik lagi, oleh pertimbangan yang sempit. Tetapi, mereka masih akan tetap berpolitik, dengan pertimbangan yang luas, dengan mencantumkan apa yang disebutnya "politik negara" itu.

Sebaiknya klaim "politik negara" itu kelak tidak dijadikan sebagai dalih bagi

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

TNI/Polri untuk kembali berpolitik. Dan sebaiknya pula tidak ada tafsir sepihak atas "politik negara" itu.

Maka di masa depan TNI dan Polri harus lebih bisa bersikap terbuka, tidak kaku, dan harus mau rajin berdialog dengan kalangan sipil. Eksklusifitas harus dihilangkan. Sisi manusiawi mereka harus dikedepankan, sehingga tempatnya di mata publik menjadi lebih terhormat, ketimbang di masa lampau, tatkala tentara dipakai sebagai penjaga kekuasaan rezim.

M ALFAN ALFIAN M
Peneliti Katalis dan ACG, Jakarta

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : Kamis / 15 / Agustus / 2002
Hlm/Kolom : 2 / 1-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : KEBIJAKAN POLITIK / 320.6

Soal Kunjungan Wapres Taiwan

Menlu: RI Tetap Anut Kebijakan "Satu Cina"

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menegaskan, Indonesia tetap menganut kebijakan "Satu Cina" dalam politik luar negerinya. Karena itu, Indonesia tidak bisa menerima kehadiran Wakil Presiden (Wapres) Taiwan Annette Lu atau Lu Hsiu Lien ke Jakarta, Rabu (14/8). Untuk itu, Wapres Lu langsung menuju Bali, sebelum ke Australia.

Menlu menjelaskan, Taiwan memang merupakan salah satu dari 48 negara yang memiliki fasilitas bebas visa kunjungan singkat. "Tetapi itu terutama untuk turis dan bisnis. Memang konsekuensinya, fasilitas itu berarti bisa dinikmati oleh setiap warga Taiwan," kata Menlu kepada *Kompas* di Jakarta, Rabu (14/8) petang.

"Tetapi, kalau sudah pada tingkat pejabat, apalagi pejabat tinggi setingkat Wapres, yang kehadirannya tentu akan membawa konsekuensi pada sikap Indonesia yang menganut kebijakan "Satu Cina", ya tidak bisalah," lanjut Menlu Wirajuda.

Siaran pers Departemen Luar Negeri (Deplu) menjelaskan, Pemerintah Indonesia sama sekali tidak mengatur kunjungan tersebut, apalagi dalam kapasitas sebagai Wapres entitas yang menamakan dirinya "Republik Cina". Dikatakan, ada kemungkinan Wapres Lu hanya transit di Indonesia menuju negara ketiga.

Ditegaskan, Indonesia menganggap penting hubungannya dalam berbagai bidang dengan Cina. Karena itu, hubungan tersebut semakin kokoh, baik bilateral maupun dalam interaksi dengan negara-negara kawasan. Dalam hal ini, Indonesia konsisten dengan kebijakan "Satu Cina". Karena itu, sejak lama Indonesia mengakui Cina Taipei sebagai bagian integral Republik Rakyat Cina. Dengan dasar itu, Indonesia tidak pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina Taipei.

Penjelasan Menlu disampaikan menanggapi gencarnya pemberitaan tentang penolakan Jakarta pada kehadiran Wapres Taiwan tersebut. Karena itu, Wapres Lu langsung berlibur di Bali, sebelum menuju Australia untuk mendapatkan perawatan medis. Televisi Taiwan *TVBS* melaporkan, Lu mendarat di Jakarta dengan pesawat *China Airline* Nomor C1677, pada pukul 12.55 WIB. Namun, Lu ditolak masuk Jakarta dan langsung dibawa ke VIP *room* tanpa alasan yang jelas.

Sekitar pukul 17.50, Lu dan rombongan tiba di Bandara Ngurah Rai Bali dengan pesawat Garuda Nomor 406. Tidak ada penyambutan resmi dari Pemerintah Provinsi Bali.

Kunjungan wisata

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai Gede Widiartha menjelaskan, kedatangan Wapres Taiwan hanya kunjungan wisata. "Mereka menggunakan bebas visa kunjungan singkat. Tetapi, paspornya memang diplomatik," kata Widiartha.

Di Bandara, Wapres Anette Lu dan rombongan menuju ruang VIP 2. Sementara itu, belasan pasukan pengaman presiden (Paspampres) berpakaian batik berjaga di sekitar ruangan tersebut. Setelah menunggu sekitar lima menit, rombongan menuju Hotel Grand Hyatt Nusa Dua menggunakan mobil sedan Mercedes seri E 320 Brabus DK 567 AS warna perak, diiringi dua sedan Volvo dan sebuah mobil minibus.

Menurut seorang karyawan reservasi di Hotel Grand Hyatt, sebanyak 28 kamar di hotel itu sudah dipesan sejak seminggu lalu untuk tempat menginap rombongan Wapres Taiwan tersebut. Rombongan Wapres seharusnya menginap dari tanggal 16 sampai 20 Agustus, namun ternyata dimajukan untuk hari Rabu kemarin.

"Kami ingin belajar dari Bali. Kunjungan ini untuk keperluan wisata dan bisnis, bukan politik," kata Hsu Chen Te, Direktur Informasi Kantor Bisnis Taiwan di Jakarta.

Media Taiwan sebelumnya mengartikan rencana Lu ke Jakarta dalam rangka "diplomasi liburan". Langkah ini sering

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

dimanfaatkan Taiwan yang secara diplomatis terisolasi, untuk "menghancurkan" cengkeraman Beijing. Karena itu, media setempat juga mengisyaratkan, rencana itu telah membuat Cina marah. Selama ini Beijing selalu mengeluhkan kunjungan para pejabat Taiwan ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Cina, seperti Indonesia.

Taiwan hingga saat ini hanya diakui 27 negara yang sebagian besar negara kecil di Afrika dan Amerika Tengah. Hubungan Cina-Taiwan mulai renggang di akhir perang sipil tahun 1949. Beijing mengancam akan menyerang jika pulau berpenduduk 23 juta jiwa dan melaksanakan administrasinya sendiri itu, mendeklarasikan kemerdekaan.

(AFP/REUTERS/COK/RIE)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 15 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 6 / 1-6
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : POLITIK BEBAS AKTIF / 320

Hatta Ilhami

Politik Bebas Aktif

JAKARTA, KOMPAS — Tonggak-tonggak peristiwa persaingan Timur-Barat, Perang Dingin, serta komunisme lawan kapitalisme mengilhami Mohammad Hatta untuk merumuskan sikap dasar hubungan luar negeri Indonesia. Rumusan "Mendayung di antara Dua Karang" yang dikemukakan Hatta pada tanggal 2 September 1948 menjadi landasan penerapan politik luar negeri Indonesia sepanjang tahun 1948 hingga sekarang.

Hal itu dikemukakan oleh guru besar Universitas Indonesia Prof Dr Juwono Sudarsono dalam Seminar Nasional "Membedah Pemikiran Perjuangan Bung Hatta" di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, Rabu (14/8). Prof Dr Taufik Abdullah tampil sebagai pembicara kunci.

Seminar yang digelar dalam rangka 100 tahun Bung Hatta tersebut menghadirkan beberapa pembicara, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Prof Dr Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Dr Refrisond Baswir, Prof Dr Syafii Ma'arif, dan Prof Frans Magnis Suseno dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.

Menurut Juwono, Bung Hatta paham apabila Indonesia terlalu berpihak pada Barat/kapitalisme, maka ia akan berlawanan dengan semangat perjuangan sejak tahun 1920 yang menentang kapitalisme-imperialisme negara-negara Barat. Pada sisi lain, karena pemahaman Hatta yang mendalam tentang Marxisme-Leninisme dan penerapan komunisme yang amat kejam di Rusia pada tahun 1930-an, Hatta berkeyakinan bahwa Indonesia harus menghindarkan diri dari paham komunisme yang membenarkan kekejaman dan kelaliman atas nama "kesejahteraan rakyat".

Sepanjang perjalanan Perang Dingin tahun 1947-1990, rumusan "Mendayung di antara Dua Karang" mengilhami semua pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan politik bebas aktif. Hatta menyadari bahwa kekuatan Amerika Serikat (AS) yang semakin meluas di seluruh dunia tidak akan memungkinkan Indonesia selalu berada tepat di tengah-tengah antara dua karang.

Dalam penerapan politik bebas aktif sekarang ini, terutama pada abad ke-21 dan lebih dari 50 tahun setelah "Mendayung di antara Dua Karang", banyak pertanyaan diajukan berkenaan dengan relevansi politik bebas aktif terutama setelah "satu karang", yaitu Uni Soviet sudah tiada.

"Bagaimanakah merumuskan politik luar negeri di tengah-tengah dunia yang sudah jauh berbeda dari keadaan lebih dari 70 tahun sejak Hatta melakukan pemetaan tentang kedudukan Indonesia di tengah pergolakan dunia, bahkan sejak 2 September 1948," papar Juwono.

Bagaimana menjelaskan dunia abad ke-21 yang sebagian besar aturan mainnya ditentukan oleh AS dengan perekonomiannya yang mencapai lebih dari sembilan trilyun dollar AS, dengan keunggulan sains dan teknologi perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan swasta yang dimilikinya. Belum lagi kekuatan Uni Eropa dan Jepang yang merupakan bagian dari 70 persen keunggulan ilmu dan teknologi dunia.

Bagaimana keluar dari lingkaran setan beban utang yang dipikul banyak negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin apabila organisasi internasional yang menentukan aturan-aturan main itu untuk bagian terbesar ditentukan di ibu kota negara-negara maju seperti Washington, London, Paris, Berlin, dan Tokyo?

Menurut Juwono, jawabannya adalah sebagai cita-cita, sebagai semangat, dan sebagai ketetapan hati, "bebas aktif" dan "Mendayung di antara Dua Karang" sesungguhnya tetap relevan bagi Indonesia. Di medan hubungan luar negeri, salah satu karang yang ada adalah yang kokoh berada di atas, terdiri atas 28 negara di Amerika Utara, Uni Eropa, dan Jepang. Negara-negara kaya ini menguasai pusat-pusat politik, ekonomi, teknologi, dan militer hingga 70 persen keseluruhan yang ada di dunia. Karang yang satu lagi telah berpindah, yakni terdiri atas 160 negara miskin yang hidup dari sisa 30 persen sumber-sumber kekuatan politik ekonomi, ilmu, teknologi, dan militer yang ada di dunia.

Dunia yang dialami Hatta tahun 1920-an amat berbeda dengan dunia yang kita hadapi tahun 2002. Kemajuan ilmu dan pengetahuan yang telah dicapai di negara-negara maju selang 50 tahun terakhir telah lebih banyak dan lebih luas daripada yang terjadi 150 tahun sebelumnya. Akan tetapi, beberapa ketimpangan struktural politik, ekonomi, dan keamanan internasional masih mirip dengan keadaan dunia lebih dari 70 tahun yang lalu.

"Kepada Mohammad Hatta kita berutang budi tentang perlunya berpikir jernih melaksanakan pemetaan cermat tentang kedudukan internasional Indonesia," kata Juwono Sudarsono. (LOK)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 29 / MARET / 2003
Hlm/Kolom : 7 / 9-0
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : HAM / 323

Ajukan Segera RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak Presiden Megawati Soekarnoputri untuk segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Berbagai kelemahan dalam substansi RUU KKR bisa diperbaiki dalam pembahasan di DPR.

Hal itu dikatakan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara kepada pers, Jumat (28/3). Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah perintah Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional dan UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

"Urgensi RUU KKR telah disampaikan ke Presiden Megawati saat bertemu Komnas HAM, Januari lalu," ujarnya.

Lewat Bab V Pasal 3 Tap MPR No V/MPR/2000, pemerintah diberi tugas membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai lembaga ekstra yudisial, yang jumlah anggota dan kriterianya ditentukan UU.

Komisi ini bertugas menegakkan kebenaran dengan mengungkap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau, sesuai ketentuan hukum dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bangsa.

Pengungkapan kebenaran dapat dilakukan dengan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, dan rehabilitasi. Atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.

"Saya dengar RUU KKR itu masih ada di meja Presiden. Pemerintah masih berpikir soal anggaran kompensasi bagi para korban. Isu itu sebenarnya tak perlu dipikir terlalu jauh. Kompensasi tak selalu harus dalam bentuk uang," katanya.

Abdul Hakim menambahkan, KKR sangat penting untuk menyelesaikan persoalan masa lalu yang tak kunjung terselesaikan. Tanpa penyelesaian masalah pelanggaran HAM masa lalu, akan sulit dicapai rekonsiliasi.

Berbagai kepentingan

Abdul Hakim mengatakan, dalam konteks penghormatan HAM, pemerintahan transisi bukannya tak berbuat apa-apa. Sudah ada beberapa UU yang menjamin perlindungan dan penghormatan HAM. Namun, penegakannya masih menghadapi masalah. "Penegakan hukum dilakukan selektif. Itu terjadi karena interaksi antara kelompok-kelompok politik yang terkait rezim lama," ujarnya.

Ia mencontohkan penuntutan mantan Presiden Soeharto yang diperlakukan sebagai ketua yayasan. "Itu kan menyamakan Soeharto dengan tokoh LSM yang tak menggambarkan peran Soeharto sesungguhnya. Ini contoh penegakan hukum yang selektif," katanya.

Memang beberapa anggota militer secara selektif diadili. Namun, persidangannya lebih merupakan simbol saja sebagai usaha penegakan hukum.

Menurut Abdul Hakim, KKR adalah wahana penting untuk mendorong para pejabat masa lalu bersikap jujur terhadap masa lalu.Ia tak menyangkal KKR bisa menciptakan *impunity* atau pembebasan hukuman. "Di beberapa negara lain pun terjadi *impunity* karena persepsi keadilan yang mau dibangun KKR adalah keadilan restoratif. KKR juga wujud penyelesaian politik, bukan penyelesaian hukum," katanyaseraya menambahkan, sebuah keputusan politik memang harus ada unsur memberi dan menerima.

Dalam draf RUU KKR terakhir yang diketahuinya, Abdul Hakim mengatakan, KKR Indonesia menyerupai KKR Afrika Selatan. Hanya saja, diberi atau tidaknya amnesti tetap akan diputuskan presiden dan DPR. Subkomisi amnesti akan memberikan rekomendasi apakah seseorang bisa diberikan amnesti atau tidak, namun keputusannya diserahkan kepada presiden setelah mendengar pertimbangan DPR. (BDM)

Perpustakaan Unikom

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : RABU / 11 / DESEMBER / 2002
Hlm/Kolom : 4 & 8 / 1-6
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : DR. HAMID AWALUDIN
No_Klass/Subjek : DEKLARASI - HAM / 323

Deklarasi HAM Universal

HARI itu, tahun 1948 di Kota San Francisco—Amerika Serikat (AS), Charles Malik, ketua delegasi Lebanon di Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan: "Kini, manusia kembali bisa menyalakan api abadi peradaban, kebebasan, dan hukum."

Malik mengemukakan itu menjelang penyusunan akhir naskah Deklarasi HAM Universal 1948, yang kelak disetujui semua wakil bangsa yang hadir dalam sidang PBB mengenai HAM (Morsink, *Human Rights Quarterly 15*, 1993). Malik adalah Ketua Komite Draf Hak Azasi Manusia yang membawahi 17 wakil negara, dalam sidang-sidang PBB yang khusus membahas Deklarasi HAM, yang diperingati lahirnya tiap 10 Desember.

Deklarasi HAM Universal 1948 adalah dokumen tertulis pertama tentang HAM yang diterima semua bangsa. Karena itu, Majelis Umum PBB menyebut Deklarasi HAM Universal 1948 sebagai *a common standard of achievement for all peoples and nations* (pencapaian yang jadi standar bersama bagi semua orang dan bangsa). Sejumlah naskah HAM tertulis memang pernah ada dan mendahului Deklarasi HAM Universal 1948. *Magna Carta* (Inggris, 1215), misalnya, telah berbicara tentang jaminan kebebasan individu untuk tidak dipenjarakan sewenang-wenang. Ia sudah berbicara tentang jaminan peradilan yang bebas dan *fair*. *Bill of Rights* tahun 1689 juga berbicara tentang hak-hak memilih secara bebas, kebebasan berbicara, dan hak untuk bebas dari penganiayaan *Declaration of Rights* 14 Oktober 1774, mengilhami *Declaration of Independence* Thomas Jefferson di AS yang juga telah berbicara tentang jaminan perlindungan untuk hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Namun, rentetan naskah itu belum menjadi naskah yang diterima secara universal (Robertson and Merrills, 1992).

Deklarasi HAM Universal 1948 diadopsi lewat Resolusi PBB No 217 (III) tahun 1948. Deklarasi HAM Universal 1948 dilahirkan di tengah reruntuhan peradaban manusia akibat Perang Dunia II dan kebrutalan monster-monster kemanusiaan, semisal Hitler, Mussolini, dan Jepang di Asia Pasifik. Selain itu, awal berlangsungnya perang dingin yang membuat polarisasi dunia yang kian menajam dan mengorbankan HAM, memicu semangat untuk membuat instrumen perlindungan HAM, yang kini kita kenal sebagai deklarasi HAM.

Sejalan dengan itu, PD II yang berahir tahun 1945, mengilhami dan memicu semangat dekolonisasi, khususnya di Asia dan Afrika. Seluruh kejadian ini membulatkan tekad warga dunia untuk membuat dataran yang bisa dipakai bersama guna menegakkan prinsip-prinsip HAM.

Deklarasi ini disebut universal karena perancangnya, secara geografis, mewakili kemajemukan etnis bangsa di muka bumi. Peserta yang amat aktif, misalnya, Charles Malik (Lebanon), Hernan Santa Cruz (Chili), Omar Loutfi (Mesir), PC Chang (Taiwan), Carlos Romulo (Filipina), Housa Mehta (India), Bogomolov (Soviet), Davies (Inggris), Roosevelt (AS), dan sebagainya.

Deklarasi ini juga dikategorikan universal karena semua negara yang saat itu hadir, menerimanya sebagai standar bersama pencapaian manusia guna melindungi martabat dan peradaban manusia.

Sejarah proses pembuatan deklarasi ditandai perdebatan sengit: apakah ia dibuat sebagai konvensi internasional yang mengikat secara hukum, atau sekadar imbauan moral dengan status deklarasi. Delegasi Cina, Soviet, AS, dan Yugoslavia, mengambil posisi, dokumen itu hanya sebatas deklarasi. Dengan demikian, ia tidak mengikat secara hukum.

Posisi yang menghendaki agar dokumen ini jadi konvensi internasional dan mengikat secara hukum, disuarakan Australia, Inggris, dan India. Mereka menghendaki agar tiap negara langsung terikat dokumen ini agar bisa sesegera mungkin berbuat sesuatu untuk melindungi martabat manusia, dan mencegah terulangnya tragedi kemanusiaan yang melatari dilahirkannya deklarasi HAM universal. Dalam kelompok ini, Inggris agak berbeda dengan lainnya, sebab kendati setuju menjadikan deklarasi ini sebagai konvensi, Inggris tidak menghendaki dicantumkannya hak-hak sosial dan ekonomi. Bagi Inggris, deklarasi ini harus berfokus pada soal-soal politik, yang paling urgen saat itu.

Di antara dua posisi yang bersilangan itu, Chili, Perancis, Mesir, dan Uruguai menempatkan diri di tengah, dengan mengombinasikan deklarasi dengan konvensi. Kelompok ini, khususnya Perancis, mengambil sikap itu dengan alasan pragmatis. Menurut Perancis, dokumen HAM tidak perlu jadi konvensi karena konvensi bersifat amat detail dan membutuhkan waktu lama untuk menyusunnya. Di saat yang sama, umat manusia sudah amat membutuhkan adanya bingkai aksi dalam hal penegakan martabat manusia. Sementara, deklarasi sudah siap dan bisa cepat menyita perhatian publik internasional. Bagi kelompok ini, dokumen HAM itu diterima dulu lalu dibuatkan konvensi nanti untuk menjabarkannya.

Selain perdebatan status dokumen, masalah substansi juga menjadi agenda perdebatan amat sengit. Hak untuk memperoleh pekerjaan misalnya, menyita waktu panjang. Ada negara menghendaki dicantumkan bahwa tiap orang berhak memperoleh pekerjaan, sementara negara-negara lain menentangnya. Hak kepemilikan, juga menjadi perdebatan seru. Australia dan Inggris menghendaki hak kepemilikan tidak [illegible] dicantumkan, sementara China dan Chili berkeras memasukkannya. Setelah perdebatan, semua peserta menyetujui, kedua hak itu dimasukkan dalam naskah deklarasi.

Deklarasi yang memiliki 30 pasal ini, secara garis besar, berbicara mengenai hak-hak dan jaminan agar tiap individu bisa hidup dan tidak boleh ada satu orang pun yang keluasa membunuhnya (*life*), tiap individu dijamin agar tidak ada individu lain yang menyiksanya (*no tor-*[illegible] dan kebebasan (*liberty*).

Untuk level operasional, Deklarasi HAM Universal 1948 dapat dibagi dalam empat kelompok besar. Pertama, penegasan prinsip yang menjadi fondasi dasar deklarasi ini bahwa tiap orang lahir dengan kebebasan dan persamaan dalam hak dan martabat.

Kedua, prinsip kesamaan dan tidak dibenarkan memberlakukan diskriminasi. Kelompok ini memberi kewajiban kepada negara untuk melindungi dan menegakkan prinsip-prinsip itu.

Ketiga, kewajiban tiap individu di masyarakat untuk menjalankan dan menegakkan HAM dan kebebasan. Keempat, larangan bagi negara, kelompok, atau individu untuk berbuat sesuatu yang bisa mencederai hak-hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi HAM Universal 1948.

Khusus bagian mukadimah, deklarasi ini berbicara tentang penegasan sikap dan pengakuan, martabat manusia adalah sesuatu yang melekat, kesamaan derajat, dan hak-hak yang melekat adalah pilar utama kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Tanpa pengnargaan atas

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun :
Hlm/Kolom :
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
No_Klass/Subjek :

prinsip-prinsip itu, bencana atau tragedi kemanusiaan tetap akan terus berlanjut.

Kendati deklarasi ini hanya singkat, ternyata cakupan soal yang dilindunginya cukup besar. Bahkan, ada hal-hal yang dicantumkan deklarasi tetapi tidak ada dalam Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, misalnya, hak untuk kepemilikan, hak untuk memperoleh suaka, dan hak untuk menentukan kebangsaan (*Burgenthal*, 1990).

Pertanyaan yang relevan untuk diajukan ialah, apa urgensi Deklarasi HAM Universal 1948 dengan Indonesia kini?

Menyaksikan rentetan kejadian pemboman yang memilukan, deklarasi ini jelas kian urgen dan relevan untuk diaplikasikan di negeri ini. Serangkaian pemboman yang terjadi, dan terakumulasi lewat tragedi Bali, semuanya menelan korban manusia dengan cara amat keji. Orang-orang tak berdosa secara sistematis dibinasakan hanya dengan satu motif, kebencian yang melampaui akal sehat, yang dinapasi keyakinan yang bersifat absolut dan sewenang-wenang. Kejadian demi kejadian itu adalah tragedi kemanusiaan yang meruntuhkan peradaban manusia.

Ada baiknya bangsa ini kembali merenungi pasal 1 Deklarasi HAM Universal 1948: "*All human beings are born free and equal in dignity and rights*" (semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang

Artinya, tidak boleh ada seorang pun di muka bumi yang mengklaim kebenaran untuk menafikan orang lain. Tidak ada seorang pun dengan tujuan serta motif apa pun, dibolehkan merenggut kemerdekaan, martabat, dan hak-hak orang lain. Paham *absolutism*, karena itu, secara absolut, tidak mendapat tempat di mana pun.

Karena tiap orang lahir dengan kemerdekaan, persamaan martabat dan hak, maka tiap orang yang mencoba memarginalkan prinsip ini, otomatis seharusnya menjadi musuh manusia. Dalam konteks ini, tindakan pengecut terorisme adalah kebiadaban yang merontokkan peradaban manusia. Karena itu, *terorism cannot be condoned, but to be condemned*. Di sini, patok-patok nasionalisme dengan sendirinya didentangkan lonceng kematiannya.

DR HAMID AWALUDIN,
Anggota Komisi Pemilihan Umum

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 10 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 7 / 1-6
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : HAMID AWALUDIN
Subjek / NO. CLASS : PEMILIHAN UMUM / 324.6

Agenda Pemilihan Presiden

UNTUK pertama kali dalam sejarah Indonesia, pada tahun 2004 nanti bangsa Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden (wapres) secara langsung. Perubahan UUD 1945 yang dilakukan MPR dalam Sidang Tahunan (ST) MPR 2002 memberi legitimasi legal untuk itu.

Keinginan dan tuntutan adanya pemilihan langsung sebenarnya diilhami praktik politik masa lalu yang kotor. Di era Orde Baru, Soeharto dipilih beberapa kali oleh MPR secara tidak *fair* karena semuanya diatur melalui mekanisme titah dari atas. MPR hanyalah stempel karet untuk mengesahkan Soeharto.

Lepas dari trauma masa lalu itu, praktik politik, khususnya pemilihan para bupati/wali kota dan gubernur yang dipilih lewat saluran DPRD yang dipraktikkan selama ini, juga membuat rakyat tidak percaya pada sistem pemilihan pemimpin melalui mekanisme saringan lembaga legislatif. Maka, pemilihan pemimpin, khususnya presiden dan wakil presiden, memang seharusnya dilakukan secara langsung. Biar rakyat yang menentukan pilihannya.

Bagaimana mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004? Konstitusi sudah menegaskan bahwa hanyalah partai politik (parpol) yang mencalonkan para calon presiden dan wakil presiden. Ini berarti, calon individu menjadi mustahil. Lalu, bagaimana cara partai politik mengajukan calon? Kita butuh instrumen hukum yang mengatur bahwa hanyalah partai politik yang memenangkan persentase suara tertentu dalam pemilihan umum (pemilu) yang berhak mengajukan calonnya. Kita bisa buat standar bahwa hanyalah parpol yang meraih 10 atau 5 persen perolehan suara minimum dalam pemilu, yang berhak mengajukan calon. Kendati angka ini sebenarnya sangat minim, tetapi cukup rasional, sebab hasil Pemilu 1999 ternyata hanya melahirkan enam parpol yang memenuhi standar 2 persen. Parpol yang tidak memenuhi standar minimum itu sebaiknya diberi kesempatan untuk menggabungkan suara mereka hingga mencapai standar yang ditentukan.

Standardisasi ini penting untuk mencegah terjadinya inflasi calon. Sebab, bagaimanapun juga sistem pemilihan presiden dan wapres secara langsung adalah hal baru di Republik ini. Karena itu, dengan mudah kita tebak bahwa pemilihan presiden dan wapres kelak pasti banyak peminatnya. Orang ingin jadi calon mungkin bukan dengan niat sungguh-sungguh mau menjadi pemimpin dan menyalurkan aspirasi rakyat. Tetapi, sekadar ingin mencoba dan menarik perhatian publik.

Menjamurnya partai politik belakangan ini bisa jadi bahan pertimbangan dan pembanding untuk asumsi tersebut. Kita juga butuh standardisasi perolehan suara untuk memotivasi para partai politik, berjuang keras dalam pemilu guna meraih suara sebanyak dalam putaran kedua. Siapa pun yang meraih suara terbanyak dalam putaran kedua ini, itulah yang berhak dilantik jadi presiden dan wakil presiden, berapa pun besar persentase suara yang diraihnya. Sejalan dengan pencalonan tersebut, ada baiknya ditegaskan dalam aturan main bahwa calon presiden dan wapres tidak harus dari partai yang sama. Ini untuk memelihara pluralitas dan menjaga keseimbangan serta mempermudah kompromi politik.

Hal yang patut kita agendakan mulai dari sekarang ialah tenggang waktu yang dibutuhkan untuk itu semua. Jika, pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat dilakukan pada bulan Juni 2004, berdasarkan pengalaman pada Pemilu 1999 kita butuh tiga bulan untuk mendapat perhitungan hasil suara akhir. Bila keadaan tersebut berulang lagi pada tahun 2004, maka pelantikan para anggota legislatif baru bisa dilakukan pada akhir September 2004, yang sekaligus berarti parpol yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden baru ketahuan pada akhir September tersebut.

Kita berasumsi bahwa pada bulan September 2004 calon presiden dan wakil presiden sudah siap, lalu pemilihan presiden/wapres dilakukan pada awal atau pertengahan Oktober. Kita toh masih berhadapan lagi dengan soal waktu perhitungan yang bisa saja kita tempuh selama dua bulan, sebulan lebih cepat daripada perhitungan suara anggota legislatif, karena pemilihan anggota legislatif lebih kompleks daripada pemilihan presiden/wapres. Artinya, hasil pemilihan presiden/wapres putaran pertama baru ketahuan pada ahir Desember 2004.

Persoalan kian pelik jika hasil putaran pertama tersebut mengharuskan adanya putaran kedua. Bisa jadi hasil putaran kedua ini baru kita ketahui pada bulan Maret 2005, sebab paling cepat kita menyelenggarakan pemilihan pada bulan Januari 2005 dan butuh waktu lagi untuk menghitung hasil perolehan suara para calon.

Bila gambaran ini terjadi, maka kita pasti akan berhadapan dengan ketegangan politik dan perdebatan konstitusional yang bisa saja berakhir dengan krisis politik. Masalahnya, masa jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri akan berakhir pada bulan Oktober 2004. Artinya, jika pemilihan presiden/wapres memang membutuhkan waktu hingga

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

tahun 2005, lalu bagaimana dengan status Presiden Megawati setelah bulan Oktober tersebut? Jalan keluarnya adalah MPR bersidang memperpanjang mandat Megawati hingga kita memiliki presiden terpilih.

Kalkulasi kasar itu bisa saja tidak terjadi. Tapi, kita semua harus memberi dukungan jelas terhadap Komisi Pemilihan Umum, pihak yang menyelenggarakan pemilihan umum. Pemerintah harus memberi anggaran dan segala peralatan yang dibutuhkan, khususnya perangkat teknologi perhitungan suara dan segala bentuk kebutuhan lainnya. Presiden Megawati sebagai penanggung jawab terlaksananya pemilihan umum yang bersih, harus menginstruksikan semua aparat dan perangkat pemerintahannya untuk tidak [redacted] secara birokratis [redacted] yang dilakukan KPU, untuk menyelenggarakan pemilihan anggota legislatif dan presiden/wapres.

Pekerjaan yang harus dilakukan sekarang setelah MPR mengubah konstitusi tentang pemilihan presiden/wapres ialah sesegera mungkin menyiapkan perangkat hukum (undang-undang) yang mengatur proses dan mekanisme pemilihan tersebut. Ada baiknya pemerintah bersama DPR segera menyiapkan pasal-pasal tentang ini, yang selanjutnya dimasukkan saja ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum, yang hendak dibahas oleh DPR. Kita tidak perlu memiliki undang-undang khusus mengenai pemilihan presiden/wapres tersebut. Ada baiknya bangsa ini hanya memiliki satu instrumen legal yang mengatur seluruh proses dan mekanisme pemilihan: mulai pemilihan anggota DPRD I dan II, DPR, DPD dan presiden/wapres. Bahkan, pemilihan bupati/wali kota dan gubernur pun, sebaiknya disatukan saja dalam [redacted] milihan

Konsekuensi logis yang timbul dengan adanya pemilihan presiden/wapres secara langsung tersebut ialah presiden tidak lagi berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada MPR, sebab presiden telah dipilih langsung oleh rakyat. Presiden hanya bisa diberhentikan jika melanggar sumpah jabatan, tindak pidana kriminal, dan prosesnya melalui Mahkamah Konstitusi.

Siapa yang mengatur program kerja presiden? Program kerja presiden sebenarnya sudah melekat dalam program yang ditawarkan kepada rakyat saat sang presiden menjadi calon dan melakukan kampanye. Saat itulah presiden menunjukkan kemampuan dan niatnya kepada rakyat melalui program kerja yang ditawarkannya. Saat itulah rakyat memberi penilaian melalui suara yang mereka berikan.

HAMID AWALUDIN
Dosen Universitas Hasanuddin